



Keterlibatan Warga Negara Dalam Menangani Ketimpangan Sosial Melalui Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata

Vinsensius Saragosa^{a, 1*}, Suparno^{a, 2}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ incensaragosa@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Februari 2022;

Revised: 12 Februari 2022;

Accepted: 31 Februari 2022.

Kata-kata kunci:

Keterlibatan Warga Negara;

Ketimpangan Sosial;

Pariwisata.

: ABSTRAK

Keterlibatan warga negara dalam memecahkan suatu permasalahan tentu hal yang sangat penting. Permasalahan ketimpangan sosial tentunya membutuhkan keterlibatan warga negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterlibatan warga negara dalam menangani ketimpangan sosial melalui forum masyarakat penyelamat pariwisata, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam menangani ketimpangan sosial dari forum masyarakat penyelamat pariwisata (Formapp) serta mengetahui dampak bagi masyarakat Labuan Bajo terkait kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Hasil penelitian tentang keterlibatan Formapp dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial di Labuan Bajo dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya mengadvokasi masyarakat dalam beberapa permasalahan dimulai dari kajian terhadap permasalahan hingga melakukan demonstrasi dan diskusi dengan pihak terkait, membangun kerjasama dengan pihak lain, serta memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan dukungan publik. Faktor penghambat yang ditemui Formapp Mabar dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial di Labuan Bajo diantaranya yakni sikap masyarakat yang masih pasif dan apatis, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki forum, kurangnya respon pemerintah dalam menanggapi permintaan forum masyarakat.

ABSTRACT

The engagement of citizens in solving a problem is certainly very important, as well as the problem of social inequality certainly requires the involvement of citizens. The purpose of this study is to know the involvement of citizens in social security through the forum of the tourism rescue community, and also to know the inhibitory factors in dealing with social inequality from the Forum of tourism rescue communities and to determine the impact for the Labuan Bajo community related to government policies that cause social inequality. Formapp's involvement in efforts to address social inequality in Labuan Bajo is carried out through several steps including advocating for the community in several issues ranging from studying the problem to conducting demonstrations and discussions with related parties, building cooperation with other parties, and utilizing social media to gain public support. Inhibitory factors encountered by Formapp Mabar in an effort to overcome social inequality in Labuan Bajo include passive and apathetic community attitudes, limitations of human resources owned by the forum, lack of government response in responding to community forum requests.

Keywords:

Civic Engagement;

Social Inequality;

Tourism.

Copyright © 2022 (Vinsensius Saragosa & Suparno). All Right Reserved

How to Cite : Saragosa, V., & Suparno, S. (2022). Keterlibatan Warga Negara Dalam Menangani Ketimpangan Sosial Melalui Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(2), 46–52. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i8.138>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Partisipasi Warga Negara menekankan peran dalam pelayanan sukarela kepada masyarakat setempat, secara individu yang bertindak secara mandiri atau sebagai peserta dalam sebuah kelompok. Keterlibatan warga negara dapat diartikan sebagai tindakan dimana individu, melalui tindakan kolektif, mempengaruhi masyarakat sipil yang lebih besar (Gusmadi, 2018). *Civic engagement* biasa dan seringkali disamakan dengan *civic participation*, adalah semua hal berkaitan dengan tindakan masyarakat baik dalam kehidupan individu maupun kelompok untuk bekerja sama dalam membangun dan membuat suatu kebijakan yang berguna dan bermanfaat untuk berbagai aktifitas dan kegiatan dalam masyarakat (Karliani, 2014).

Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai kemampuan kepariwisataan nasional, bertujuan agar mampu meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa (Ariyanto dkk., 2020). Adapun kegunaan atau Manfaat yang timbul dari keterlibatan warga negara sebagai bagian dari visi pendidikan timbul lebih seimbang dan holistik pada kompetensi warga negara muda jika ditopang oleh pembelajaran yang efektif dan aktualisasi yang juga efektif di masyarakat (Rahmelia & Ar, 2019). Penyelamatan pariwisata harus didasarkan pada tolak ukur keberlanjutan yang dimana artinya bahwa pembangunan dapat didukung melalui lingkungan hidup dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat (Mukhsin, 2017). Pembangunan ekonomi daerah merupakan sebuah proses, yaitu proses melingkupi pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menjadikan produk dan jasa yang akan lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Krismaningrum & Marseto, 2020).

Pengaruh pariwisata menimbulkan keramaian yang berasal dari wisatawan lokal maupun manca negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk melakukan usaha di kawasan wisata untuk merealisasikan tujuan wisata mensejahterakan masyarakat, dampak pariwisata terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja menimbulkan hal-hal yang baru bagi masyarakat. Kesenjangan sosial: Terjadinya perubahan aktifitas masyarakat dari bertani ke pariwisata dengan menekuni pekerja baru dibidang pariwisata jiwa kebersamaannya mulai hilang dan justru muncul kompetisi diantara mereka karena terjadi penurunan penghasilan akibat relokasi tempat usaha (Juniasa, 2020). Upaya mengatasi kemiskinan yang dilakukan paling tidak harus memiliki sasaran strategis yang dapat berupa perluasan kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan produktivitas masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (Muhardi, 2000).

Pada penelitian ini saya sebagai peneliti membahas mengenai keberadaan dan kesadaran masyarakat (forum, perkumpulan atau pegiat) yang mempunyai manfaat program yang sama dalam menyelamatkan pariwisata dari praktek-praktek yang tidak sehat dalam mengelola pariwisata serta mendukung keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk merespon dan tanggap akan kelangsungan sektor pariwisata melalui tindakan sosial. Pada penelitian sebelumnya terkait persoalan pengelolaan pariwisata pengembangan sosial ekonomi masyarakat masih sangat terbatas, terjadi kesenjangan ekonomi karena usaha ekonomi hanya dikuasai oleh sekelompok orang dan sebagian besar pulau-pulau kecil terisolasi karena lokasi yang jauh dan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang kurang memadai (Sutanto., 2017).

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah bisa mengetahui keterlibatan warga negara dalam menangani ketimpangan sosial melalui forum masyarakat penyelamat pariwisata, dan juga masyarakat mengetahui faktor penghambat dalam menangani ketimpangan sosial dari Forum masyarakat penyelamat pariwisata serta mengetahui dampak bagi masyarakat labuan bajo terkait kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial.

Pada keterlibatan masyarakat Labuan Bajo dalam menangani ketimpangan sosial salah satunya terlihat melalui peran suatu komunitas atau forum yang mengumpulkan seuruh masyarakat yang sepemikiran dan berjuang dalam memperoleh hak-hak masyarakat dalam berbagai aspek. Forum yang banyak bergerak dalam membela hak warga Labuan Bajo dan telah membantu dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat adalah Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat yang dikenal dengan nama Formapp Mabar.

Keberadaan Formapp Manggarai Barat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menuangkan pemikiran dan aspirasinya kepada pemerintah serta menjadi pendukung terhadap perjuangan hak-hak masyarakat setepat dalam dunia industri pariwisata yang terus berkembang di Labuan Bajo namun belum banyak dirasakan keuntungannya oleh masyarakat setempat. Kesenjangan yang dirasakan masyarakat Labuan Bajo dalam merasakan keuntungan dari pembangunan pariwisata yang terjadi menjadi hal yang melatarbelakangi keberadaan Formapp Mabar itu sendiri di tengah masyarakat Manggarai Barat.

Keterlibatan warga negara ini dapat diartikan sebagai usaha mempercayai seseorang dapat dan harus mampu membuat perbedaan dalam meningkatkan komunitasnya. Untuk meningkatkan masyarakat, seseorang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan. Keterlibatan warga negara menekankan partisipasi dalam pelayanan sukarela kepada masyarakat setempat, baik oleh individu yang bertindak secara pribadi atau sebagai peserta dalam sebuah kelompok. Keterlibatan warga negara dapat diartikan sebagai cara dimana individu, melalui tindakan kolektif, mempengaruhi masyarakat sipil yang lebih besar.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan, sedangkan data skunder berupa artikel jurnal serta catatan lapangan lainnya. Prosedur pengumpulan data didapatkan dari teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif

Hasil dan Pembahasan

Hasil yang didapat dari temuan penelitian yaitu Masyarakat Desa Gorontalo Labuan Bajo Manggarai Barat diketahui bahwa Formapp sebelum melakukan demo, melakukan tahapan inventarisasi persolan yang ada dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dikaji untuk melihat permasalahan tersebut dari berbagai aspek dan menyiapkan argumentasi yang tepat atas dasar peraturan yang ada sehingga dapat dimajukan ke jalur hukum jika diperlukan. Setelah melakukan kajian dan mengajukan temuan tersebut kepada pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, Formapp juga melakukan langkah berupa demonstrasi hingga membuka ruang dialog dengan pihak pemerintah sehingga aspirasi dan argumentasi yang diajukan dapat didengarkan secara langsung. Formapp Manggarai Barat adalah sebuah organisasi yang dipercayai oleh masyarakat Manggarai Barat untuk menindaklanjuti berbagai harapan, impian dari seluruh masyarakat manggarai barat sekaligus formapp ini di harapkan untuk menjadi jembatan dari semua aspirasi masyarakat manggarai barat untuk disampaikan atau di lanjutkan kepada pemerintah kabupaten manggarai barat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta menjadi pendukung terhadap perjuangan hak-hak masyarakat setempat yang belum banyak merasakan keuntungan dari pembangunan pariwisata di Manggarai Barat. Karena secara tidak langsung jika pembangunan pariwisata di kabupaten manggarai barat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat maka kesejahteraan sosial masyarakat dapat dicapai sehingga ketimpangan sosial pun dapat diatasi. Keterlibatan Formapp Manggarai Barat dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial di Labuan Bajo dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya

mengadvokasi masyarakat dalam beberapa permasalahan terkait pariwisata dan lingkungan di Labuan Bajo, membangun kerjasama dengan pihak lain, serta memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan dukungan publik secara luas. Pariwisata merupakan suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dimanah dilaksanakan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan meninggalkan tempat yang semula menuju tempat yang baru dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan membutuhkan ketenangan, kebahagiaan dan merefleksikan diri.

Ketimpangan sosial pada umumnya dipahami sebagai suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan atau kesenjangan dalam tatanan sosial yang menjurus kepada adanya bentuk kelas-kelas social di tengah masyarakat keadaan kontras seperti mengakibatkan jurang pemisah kelas atas dan bawah. Pembagian kelas sosial tersebut umumnya dinilai dari pendapatan ekonomi yang dimiliki setiap orang, seperti ada seseorang yang memperoleh gaji bulanan dengan jumlah yang besar namun sebaliknya ada yang mendapatkan penghasilan per hari yang pas-pasan.

Perbedaan penghasilan yang diperoleh setiap orang tersebut muncul dari perbedaan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya sesuai dengan bidang usaha. Dalam mengelola sumber daya alam, faktor yang memicu itu adalah berkaitan dengan kurangnya kapasitas diri, minim keterampilan sehingga potensi-potensi yang ada tidak di berdaya gunakan dengan baik, aspek terpenting yang sangat perlu dilakukan adalah proses pendidikan yang bersifat kontekstual, dengan cara seperti terampil dalam pengelolaan sumber daya alam membawa manfaat. Sehingga dapat diketahui bahwa ketimpangan sosial yang muncul dari faktor ekonomi tersebut muncul karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial yang ada diantara masyarakat yang hidup di lingkungan tertentu. Dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat di suatu daerah, bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah untuk mengatasinya, namun mejadi tugas bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), pihak swasta atau perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, civitas akademika dan bahkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran serta dalam upaya pembangunan nasional termasuk dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi. Keterlibatan yang diberikan masyarakat tersebut menjadi bentuk interaksi sosial dalam proses pembentukan community civic sebagai pemecahan masalah lingkungan. Formapp juga memberikan keterlibatannya dalam mendukung upaya mengatasi ketimpangan sosial di Labuan Bajo melalui pembentukan kelompok bahasa asing untuk membantu masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan Formapp menjadi wadah bagi masyarakat Manggarai Barat khususnya di Labuan Bajo yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di bidang pariwisata, dimana mereka saling berkumpul dan saling berbagai ilmu. Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa anggota Formapp seringkali membangun diskusi bersama masyarakat Labuan Bajo untuk saling berbagai ilmu. Diskusi tersebut dibangun selain memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat, juga membangun kelompok bahasa asing diantara masyarakat. Hal ini dimulai karena melihat kebutuhan dari pariwisata Labuan Bajo yang mendatangkan turis sehingga dibutuhkan para guide untuk membantu turis-turis tersebut, yang kemudian dalam prosesnya mereka yang menjadi guide harus dapat setidaknya memiliki pengetahuan berbahasa asing yang baik.

Formapp Manggarai Barat merupakan forum perkumpulan yang tergabung dari berbagai unsur pelaku wisata dan pecinta konservasi masyarakat Manggarai Barat. Formapp Mabar tersebut menjadi wadah bagi para pecinta lingkungan serta pelaku wisata yang peduli terhadap lingkungan wisata yang berada di Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata untuk menyampaikan aspirasinya dan mendukung pengembangan wisata di Labuan Bajo menjadi lebih baik.

Forum Formapp tidak hanya menjaga satwa dan objek wisata di Labuan Bajo saja, namun juga peduli terhadap perbaikan tatanan sosial masyarakat di Labuan Bajo, karena sektor pariwisata juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat setempat. Sehingga hal tersebut menjadi fokus yang melatarbelakangi setiap langkah Formapp dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata jika di kembangkan dengan baik jelas memiliki dampak positif,

ini tidak serta merta dikelola secara sepihak, melainkan mengikutsertakan seluruh stakeholder agar pengembangan pariwisata membawa keuntungan bagi semua pihak (Pitana & Diarta, 2009). Taraf kesejahteraan bukan sekedar dilihat dari sisi material dan spiritual, namun yang jauh lebih penting adalah aspek kultur dan intelektual pada masyarakat yang menjadi pemilik daerah wisata itu sendiri. (Paynter dkk., 2018).

Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk keaktifan dalam mengambil bagian permasalahan sosial, dimana masyarakat diharuskan untuk menjadi agen perubahan dilingkungan sosialnya (Abdillah, 2015), keterlibatan Masyarakat memiliki peran serta dalam upaya pembangunan nasional termasuk dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam rangka memaksimalkan program-program sebagai bentuk kerja sama guna mewujudkan target-target ideal yang sejalan dan sesuai cita-cita dan harapan bersama (Aldary & Salamah, 2018) Keterlibatan yang diberikan masyarakat tersebut menjadi bentuk interaksi sosial dalam proses pembentukan *community civic* sebagai pemecahan masalah lingkungan. Keterlibatan warga negara bukan hanya memberikan informasi ataupun memberikan dukungan tetapi ada hal lain yaitu tentang memperkuat rasa kebersamaan dalam membangun Kewarganegaraan (Wadu, 2016; Wadu et al., 2019; Wadu, Ladamay, & Bandut, 2020; Wadu, Ladamay, & Fitriya, 2020; Wadu, Ladamay, & Jenia, 2020). Konsep keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dipahami sebagai proses melibatkan masyarakat dalam segala kegiatan dan pengambilan keputusan serta evaluasi atas suatu kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah. Pengembangan pembangunan disektor pariwisata sekiranya harus mendorong keterlibatan masyarakat agar keberadaan masyarakat tidak saja sebagai penikmat melainkan pelaku yang berorientasi pada adanya lapangan pekerjaan serta hitungan akan keuntungan yang didapat bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Raharjana, 2012). Dalam mengembangkan potensi pariwisata, partisipasi masyarakat menjadi factor terpenting, implikasinya adalah apakah nanti pengembangan pariwisata itu berjalan sesuai rencana atau malah keliru dan bisa saja merugikan, untuk itu dalam melakukan perencanaan harus bisa dikaji secara mendalam serta menyiapkan segala cara dalam melakukan pengendalian kebijakan.

Pada keterlibatannya forum masyarakat penyelamat dan peduli pariwisata (FORMAPP) Manggarai Barat dalam menangani ketimpangan sosial bahwasanya warga Labuan Bajo Manggarai Barat telah berperan dan menunjukkan keterlibatan dirinya dalam upaya menangani ketimpangan sosial di Labuan Bajo, salah satunya melalui forum masyarakat yang bernama Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat atau Formapp Jabar. Formapp Manggarai Barat dipercayai oleh masyarakat manggarai barat khususnya Labuan Bajo untuk dijadikan sebagai media prantara dari seluruh aspirasi maupun masukan dari masyarakat manggarai barat yang dimanah segala aspirasi dari masyarakat akan di lanjutkan atau di teruskan kepada pemerintah, serta menjadi pendukung terhadap perjuangan hak-hak masyarakat setempat yang belum banyak merasakan keuntungan dari pembangunan pariwisata di Manggarai Barat. Ketimpangan sosial terjadi karena adanya perbedaan sosial dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok. Bagi negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, ketimpangan sosial bisa menjadi ancaman keamanan nasional sebab ketimpangan sosial ini akan berakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks. Akhirnya ketimpangan sosial bisa menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi proses pembangunan masyarakat itu sendiri. Pada pembangunan pariwisata yang gencar dilakukan di Labuan Bajo membuat kehidupan sosial masyarakat setempat ikut berubah dimana memunculkan adanya perbedaan status bagi mereka yang berhasil masuk dalam industri pariwisata dan mereka yang tidak bisa merasakan keuntungan dari pembangunan tersebut hingga menciptakan adanya kesenjangan sosial. Dampak dari hal ini yang menyebabkan pelebaran kesenjangan ekonomi di antara orang-orang di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai barat adalah orang miskin akan semakin miskin dan orang kaya akan semakin kaya. Hal ini diakibatkan tidak meratanya pemanfaatan atas pembangunan pariwisata bagi masyarakat setempat, karena sebagian besar objek wisata lebih banyak menguntungkan pihak luar dan tidak

dirasakan keuntungannya oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Labuan Bajo Manggarai Barat sebagai penduduk setempat merasakan adanya dampak dari kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri pariwisata namun disisi lain dinilai membatasi akses masyarakat. Beberapa kebijakan yang dimunculkan dinilai masyarakat lebih banyak menguntungkan pihak swasta seperti dalam bentuk ijin pembangunan usaha maupun keterbatasan akses bagi masyarakat. Selain itu masyarakat juga belum merasakan adanya pengaruh signifikan yang dirasakan dalam pembangunan sebagai upaya menangani ketimpangan sosial di Labuan Bajo Manggarai Barat, karena pemerintah masih kurang memberikan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat setempat untuk lebih meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terjun dalam dunia pariwisata.

Simpulan

Keterlibatan warga Labuan Bajo Manggarai Barat telah ditunjukkan melalui Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat atau Formapp Mabar. Formapp Mabar menjadi wadah bagi masyarakat untuk menuangkan pemikiran dan aspirasinya kepada pemerintah, serta menjadi pendukung terhadap perjuangan hak-hak masyarakat setempat. Keterlibatan Formapp Mabar dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial di Labuan Bajo dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya mengadvokasi masyarakat dalam beberapa permasalahan dimulai dari kajian terhadap permasalahan hingga melakukan demonstrasi dan diskusi dengan pihak terkait, membangun kerjasama dengan pihak lain, serta memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan dukungan publik. Selain itu masyarakat setempat lainnya juga memberikan dukungan dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial dengan terlibat aktif dalam setiap kegiatan serta program yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Keterlibatan Formapp dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial di Labuan Bajo dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya mengadvokasi masyarakat dalam beberapa permasalahan dimulai dari kajian terhadap permasalahan hingga melakukan demonstrasi dan diskusi dengan pihak terkait, membangun kerjasama dengan pihak lain, serta memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan dukungan publik. Faktor penghambat yang ditemui Formapp Mabar dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial di Labuan Bajo diantaranya yakni sikap masyarakat yang masih pasif dan apatis, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki forum, kurangnya respon Pemerintah dalam menanggapi permintaan forum masyarakat.

Referensi

- Abdillah, F. (Universitas P. I. (2015). Pengembangan Keterlibatan Warga Negara Melalui Penggalangan Dana Online Untuk Memupuk Tanggung Jawab Sosial Mahasiswa: Studi Grounded Theory Proyek Crowdfunding Bantu Baca di Kitabisa.com.
- Aldary, I. T., & Salamah, U. (2018). Civic Engagement on Social Media: 2018 West Java Gubernatorial Election in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 7(2), 129–139. <https://doi.org/10.7454/jki.v7i2.9668>
- Ariyanto, A., Sudarsono, A., Ivantan, I., Akbar, M. F., & Munarsih, M. (2020). Pengembangan Potensi Destinasi Wisata Curug Angkrek melalui Media Sosial di Kp. Cimuncang, Desa Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. *BAKTIMAS: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 95–99. <https://doi.org/10.32672/btm.v2i2.2131>
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 105–117. <https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.718>
- Juniasa, I. D. N. (2020). Dampak Kebijakan Pembangunan Pariwisata Pantai Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Perilaku Masyarakat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 887–893. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11551>
- Karlani, E. (2014). Membangun Civic Engagement Melalui Model Service Learning Untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*,

27(2), 71–78.

- Muhardi. (2000). Pengentasan Kemiskinan Dalam Membangun Masyarakat Madani. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 16, No.3, 228–239.
- Mukhsin, D. (2017). Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.29313/jpwk.v14i1.2549>
- Paynter, M., Halabi, A.K. & Lawton, A. (2018). The Neo-Institutionalism Influences on Corporate Social Responsibility Reporting Development in Australia: A Three Company Study (David Crowther (ed.)) https://doi.org/10.1007/978-981-10-5047-3_12
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata* (pp. 1–221).
- Raharjana, D. T. (2012). Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata Di Dieng Plateau. *Jurnal Kawistara*, 2(3), 225–237. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3935>
- Rahmelia, S., & Ar, E. D. (2019). Transformasi Spirit Konferensi Asia Afrika pada Keterlibatan Warga Negara Muda sebagai Pembinaan Identitas Kebangsaan. *Moral and Civic Education*, 3(2), 48–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/8851412322019184>
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan (Studi Fenomenologi: Konversi Belis Gading Gajah Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Lamaholot Di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), 56–73.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Bandut, S. (2020). Keterlibatan Warga Negara Di Desa Sompang Kolang Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Ekonomi Dengan Memproduksi Gula Aren. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.11476>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41–50. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/citizenship.v8i1.6076>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jama, S. R. (2019). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kegiatan Karang Taruna. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 1–8. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i2.7546>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116–125. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8536>